



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal bulan tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5155);
13. Peraturan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

24. Peraturan

24. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
26. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2021.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2021.

BAB II
PERUBAHAN APBD

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp959.792.750.393,00 bertambah sebesar Rp91.428.520.888,00 sehingga menjadi Rp1.017.221.271.281,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Pendapatan daerah | |
| 1. semula | Rp925.792.750.393,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp50.241.392.228,80</u> |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp976.034.142.622 |
| b. Belanja daerah | |
| 1. semula | Rp951.776.750.393,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp57.428.520.888,00</u> |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | Rp1.009.205.271.281,00 |
| c. Pembiayaan | |

c. Pembiayaan daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a) semula	Rp34.000.000.000,00
b) bertambah	<u>Rp7.187.128.659,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp41.187.128.659
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) semula	Rp8.016.000.000,00
b) bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp8.016.000.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp33.171.128.659
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1. semula	Rp157.136.217.423,00
2. (berkurang)	<u>Rp(2.599.741.529,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp154.536.475.894
b. Pendapatan transfer	
1. semula	Rp736.693.788.725,00
2. bertambah	<u>Rp27.841.133.758,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp764.534.922.483,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. Semula	Rp31.962.744.245,00
2. Bertambah	<u>Rp25.000.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp56.962.744.245,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah ;	
1. semula	Rp36.395.769.614,00
2. (berkurang)	<u>Rp(715.979.180,00)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp35.679.790.434,00
b. Retribusi daerah ;	
1. semula	Rp8.810.594.665,00
2. bertambah	<u>Rp20.000.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp8.830.594.665,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ;	
1. semula	Rp9.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp96.237.651,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp9.096.237.651,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ;	
1. semula	Rp102.929.853.144,00
2. (berkurang)	<u>Rp(2.000.000.000,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp100.929.853.144,00

(2) Pendapatan

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
- a. Transfer pemerintah pusat ;
 - 1. semula Rp638.602.304.000,00
 - 2. (berkurang) Rp(16.306.801.000,00)
 - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp622.295.503.000,00
 - b. Pendapatan transfer antar daerah ;
 - 1. semula Rp98.091.484.725,00
 - 2. bertambah Rp44.147.934.758,00
 - Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp142.239.419.483,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :
- a. Pendapatan Hibah ;
 - 1. semula Rp11.235.144.245,00
 - 2. bertambah Rp6.000.000.000,00
 - Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp17.235.144.245,00
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - 1. semula Rp20.727.600.000,00
 - 2. bertambah Rp19.000.000.000,00
 - Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp39.727.600.000,00

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

- a. Belanja operasi ;
 - 1. semula Rp733.442.782.051,00
 - 2. bertambah Rp2.530.822.355,00
 - Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp735.973.604.406,00
- b. Belanja modal ;
 - 1. semula Rp203.333.968.342,00
 - 2. bertambah Rp44.966.917.533,00
 - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp248.300.885.875,00
- c. Belanja tidak terduga ;
 - 1. semula Rp15.000.000.000,00
 - 2. bertambah Rp9.930.781.000,00
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp24.930.781.000,00
- d. Belanja transfer ;
 - 1. semula Rp 0,00
 - 2. bertambah Rp 0,00
 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai ;
 - 1. semula Rp320.611.867.056,00
 - 2. bertambah Rp12.571.550.842,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp333.183.417.898,00

b. belanja

b. belanja barang dan jasa ;		
1. semula	Rp400.240.784.091,00	
2. berkurang	<u>Rp(4.233.862.487,00)</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp396.006.921.604,00
c. belanja bunga ;		
1. semula	Rp2.500.000.000,00	
2. (berkurang)	<u>Rp(1.480.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp1.020.000.000,00
d. belanja hibah ;		
1. semula	Rp8.090.130.914,00	
2. (berkurang)	<u>Rp(2.626.750.000,00)</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp5.463.380.904,00
e. belanja bantuan sosial ;		
1. semula	Rp2.000.000.000,00	
2. (berkurang)	<u>Rp(1.700.116.000,00)</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp299.884.000,00
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :		
a. Belanja modal tanah ;		
1. semula	Rp13.512.17.800,00	
2. (berkurang)	<u>Rp(9.917.170.800,00)</u>	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp3.595.000.000,00
b. belanja modal peralatan dan mesin ;		
1. semula	Rp33.088.821.032,00	
2. bertambah	<u>Rp5.588.084.891,00</u>	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp38.676.905.923,00
c. belanja modal gedung dan bangunan ;		
1. semula	Rp88.443.652.460,00	
2. bertambah	<u>Rp43.194.254.094,00</u>	
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan		Rp131.637.906.554,00
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi ;		
1. semula	Rp68.062.599.050,00	
2. (berkurang)	<u>Rp6.110.099.348,00</u>	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan		Rp74.172.698.398,00
e. belanja modal aset tetap lainnya ;		
1. semula	Rp226.725.000,00	
2. (berkurang)	<u>Rp(8.350.000,00)</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp218.375.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yaitu ;		
1. semula	Rp15.000.000.000,00	
2. bertambah	<u>Rp9.930.781.000,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp24.930.781.000,00
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas ;		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	Rp	0,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan ;	
1. semula	Rp34.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp7.187.128.659,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp41.187.128.659,00
b. Pengeluaran Pembiayaan ;	
1. semula	Rp8.016.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (0,00)</u>
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp8.016.000.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya ;
- | | |
|---|---------------------------|
| 1. semula | Rp34.000.000.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp7.187.128.659,00</u> |
| Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp41.187.128.659,00 |
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :
- a. Penyertaan modal daerah ;
- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. semula | Rp5.250.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan | Rp5.250.000.000,00 |
- b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo ;
- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. semula | Rp2.766.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp2.766.000.000,00 |

Pasal 9

Uraian Lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2021;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021;
4. Lampiran IV

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta keluaran Tahun Anggaran 2021;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2021;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2021; dan
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2021

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 27 Oktober 2021

WALIKOTA PAREPARE,


TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,


IWAN ASAAD

KOTA PARE PARE
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	157.136.217.423	154.536.475.894	(2.599.741.529)	2 %
4.1.01	Pajak Daerah	36.395.769.614	35.679.790.434	(715.979.180)	2 %
4.1.02	Retribusi Daerah	8.810.594.665	8.830.594.665	20.000.000	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.000.000.000	9.096.237.651	96.237.651	1 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	102.929.853.144	100.929.853.144	(2.000.000.000)	2 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	736.693.788.725	764.534.922.483	27.841.133.758	4 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	638.602.304.000	622.295.503.000	(16.306.801.000)	3 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	98.091.484.725	142.239.419.483	44.147.934.758	45 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	31.962.744.245	56.962.744.245	25.000.000.000	78 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	11.235.144.245	17.235.144.245	6.000.000.000	53 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.727.600.000	39.727.600.000	19.000.000.000	92 %
	Jumlah Pendapatan	925.792.750.393	976.034.142.622	50.241.392.229	5 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	733.442.782.051	735.973.604.406	2.530.822.355	0 %
5.1.01	Belanja Pegawai	320.611.867.056	333.183.417.898	12.571.550.842	4 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.240.784.091	396.006.921.604	(4.233.862.487)	1 %
5.1.03	Belanja Bunga	2.500.000.000	1.020.000.000	(1.480.000.000)	59 %
5.1.05	Belanja Hibah	8.090.130.904	5.463.380.904	(2.626.750.000)	32 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000	299.884.000	(1.700.116.000)	85 %
5.2	BELANJA MODAL	203.333.968.342	248.300.885.875	44.966.917.533	22 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	13.512.170.800	3.595.000.000	(9.917.170.800)	73 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.088.821.032	38.676.905.923	5.588.084.891	17 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88.443.652.460	131.637.906.554	43.194.254.094	49 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.062.599.050	74.172.698.398	6.110.099.348	9 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	226.725.000	218.375.000	(8.350.000)	4 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000	24.930.781.000	9.930.781.000	66 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	24.930.781.000	9.930.781.000	66 %
5.4	BELANJA TRANSFER	0	0	0	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0 %
	Jumlah Belanja	951.776.750.393	1.009.205.271.281	57.428.520.888	6 %
	Total Surplus/(Defisit)	(25.984.000.000)	(33.171.128.659)	(7.187.128.659)	-28 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34.000.000.000	41.187.128.659	7.187.128.659	21 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	34.000.000.000	41.187.128.659	7.187.128.659	21 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	34.000.000.000	41.187.128.659	7.187.128.659	21 %

KOTA PARE PARE
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.016.000.000	8.016.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.250.000.000	5.250.000.000	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.766.000.000	2.766.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8.016.000.000	8.016.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	25.984.000.000	33.171.128.659	7.187.128.659	28 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Wakil Kota Pare Pare

DR. H. M. TAUFAN PAWE, SH, MH.

KOTA PARE PARE
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	98.419.813.714	440.509.791.261	171.107.183.358	0	0	611.616.974.619	96.419.813.714	449.155.365.782	217.933.792.497	0	0	667.089.158.279	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	44.000.000	189.520.005.175	8.023.600.800	0	0	197.543.605.975	44.000.000	186.790.043.806	14.299.003.169	0	0	201.089.046.975	
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	44.000.000	189.520.005.175	8.023.600.800	0	0	197.543.605.975	44.000.000	186.790.043.806	14.299.003.169	0	0	201.089.046.975	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	96.911.313.714	200.788.780.996	38.776.803.708	0	0	239.565.584.704	94.911.313.714	210.922.749.886	58.743.264.455	0	0	269.666.014.341	
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	12.955.359.114	88.369.964.988	17.919.114.603	0	0	106.289.079.591	10.955.359.114	96.520.563.958	18.420.826.828	0	0	114.941.390.756	
02	1.02.0.00.0.00.03.00 RSUD. A. MAKKASAU	83.955.954.600	112.418.816.008	20.857.689.105	0	0	133.276.505.113	83.955.954.600	114.402.185.918	40.322.437.627	0	0	154.724.623.545	
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.450.000.000	14.150.537.270	114.041.160.050	0	0	128.191.697.320	1.450.000.000	14.865.445.870	133.402.244.213	0	0	148.267.690.083	
1 03	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.450.000.000	14.150.537.270	114.041.160.050	0	0	128.191.697.320	1.450.000.000	14.865.445.870	133.402.244.213	0	0	148.267.690.083	
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	12.237.720.100	9.299.155.800	0	0	21.536.875.900	0	12.477.037.800	10.991.374.360	0	0	23.468.412.160	
1 04	1.04.2.10.0.00.05.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0	12.237.720.100	9.299.155.800	0	0	21.536.875.900	0	12.477.037.800	10.991.374.360	0	0	23.468.412.160	

1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	14.500.000	13.674.660.700	966.463.000	0	0	14.641.123.700	14.500.000	14.225.986.200	208.921.500	0	0	14.434.907.700
1	05	1.05.0.00.0.00.06.0000	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	5.721.502.600	270.519.000	0	0	5.992.421.600	0	5.912.282.100	83.884.500	0	0	5.996.166.600
1	05	1.05.0.00.0.00.07.00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	14.500.000	5.258.414.100	502.488.000	0	0	5.760.902.100	14.500.000	5.258.414.100	17.488.000	0	0	5.275.932.100
1	05	1.05.0.00.0.00.08.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	2.694.344.000	193.456.000	0	0	2.887.800.000	0	3.055.290.000	107.549.000	0	0	3.162.839.000
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0	10.138.087.020	0	0	0	10.138.087.020	0	9.874.102.220	288.984.800	0	0	10.163.087.020
1	06	1.06.0.00.0.00.09.00	DINAS SOSIAL	0	10.138.087.020	0	0	0	10.138.087.020	0	9.874.102.220	288.984.800	0	0	10.163.087.020
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.675.866.915	74.604.586.760	22.301.585.540	0	0	96.906.172.300	3.595.866.915	74.519.728.010	15.800.474.390	0	0	90.320.202.400
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0	4.785.787.100	17.448.000	0	0	4.803.235.100	0	4.802.435.100	50.800.000	0	0	4.853.235.100
	07	2.07.2.17.0.00.10.00	DINAS TENAGA KERJA	0	4.785.787.100	17.448.000	0	0	4.803.235.100	0	4.802.435.100	50.800.000	0	0	4.853.235.100
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	40.000.000	3.893.788.700	1.333.804.900	0	0	5.227.593.600	40.000.000	4.484.918.600	1.099.030.000	0	0	5.583.948.600
2	08	2.08.0.00.0.00.11.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	40.000.000	3.893.788.700	1.333.804.900	0	0	5.227.593.600	40.000.000	4.484.918.600	1.099.030.000	0	0	5.583.948.600
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0	3.201.246.700	29.104.800	0	0	3.230.351.500	0	3.399.958.750	29.104.800	0	0	3.429.063.550
2	09	2.09.0.00.0.00.12.00	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	3.201.246.700	29.104.800	0	0	3.230.351.500	0	3.399.958.750	29.104.800	0	0	3.429.063.550
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	127.829.200	13.512.170.800	0	0	13.640.000.000	0	155.000.000	3.595.000.000	0	0	3.750.000.000

2	10	1.04.2.10.0.05.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0	127.829.200	13.512.170.800	0	0	13.640.000.000	0	155.000.000	3.595.000.000	0	0	3.750.000.000
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.385.000.000	18.816.473.700	3.924.999.800	0	0	22.741.473.500	1.385.000.000	18.155.461.900	4.469.865.600	0	0	22.625.327.500
2	11	2.11.0.00.0.00.13.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.385.000.000	18.816.473.700	3.924.999.800	0	0	22.741.473.500	1.385.000.000	18.155.461.900	4.469.865.600	0	0	22.625.327.500
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	4.097.924.000	83.208.000	0	0	4.181.132.000	0	3.732.579.550	314.409.750	0	0	4.046.989.300
2	12	2.12.0.00.0.00.14.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	4.097.924.000	83.208.000	0	0	4.181.132.000	0	3.732.579.550	314.409.750	0	0	4.046.989.300
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	1.839.220.801	0	0	0	1.839.220.801	0	1.819.635.851	0	0	0	1.819.635.851
2	13	2.14.0.00.0.00.15.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	1.839.220.801	0	0	0	1.839.220.801	0	1.819.635.851	0	0	0	1.819.635.851
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	2.430.499.459	1.104.384.740	0	0	3.534.884.199	0	2.415.717.859	1.109.384.740	0	0	3.525.102.599
2	14	2.14.0.00.0.00.15.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	2.430.499.459	1.104.384.740	0	0	3.534.884.199	0	2.415.717.859	1.109.384.740	0	0	3.525.102.599
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1.950.866.915	4.893.193.300	261.892.000	0	0	5.155.085.300	1.950.866.915	4.839.143.300	265.942.000	0	0	5.105.085.300
2	15	2.15.0.00.0.00.16.0000	DINAS PERHUBUNGAN	1.950.866.915	4.893.193.300	261.892.000	0	0	5.155.085.300	1.950.866.915	4.839.143.300	265.942.000	0	0	5.105.085.300

2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	150.000.000	15.757.800.000	487.300.000	0	0	16.245.100.000	150.000.000	14.873.615.000	787.568.700	0	0	15.661.183.700
2	16	2.16.2.20.2.21.17.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	150.000.000	15.757.800.000	487.300.000	0	0	16.245.100.000	150.000.000	14.873.615.000	787.568.700	0	0	15.661.183.700
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0	1.116.991.100	413.312.200	0	0	1.530.303.300	0	1.480.303.300	0	0	0	1.480.303.300
2	17	2.07.2.17.0.00.10.00	DINAS TENAGA KERJA	0	1.116.991.100	413.312.200	0	0	1.530.303.300	0	1.480.303.300	0	0	0	1.480.303.300
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0	3.985.631.000	74.132.000	0	0	4.059.763.000	0	4.383.949.050	354.740.200	0	0	4.738.689.250
2	18	2.18.0.00.0.00.19.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	3.985.631.000	74.132.000	0	0	4.059.763.000	0	4.383.949.050	354.740.200	0	0	4.738.689.250
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	150.000.000	5.855.078.800	857.851.200	0	0	6.712.930.000	70.000.000	5.979.759.750	2.844.750.100	0	0	8.824.509.850
2	19	2.19.3.26.0.00.20.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	150.000.000	5.855.078.800	857.851.200	0	0	6.712.930.000	70.000.000	5.979.759.750	2.844.750.100	0	0	8.824.509.850
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	137.000.000	0	0	0	137.000.000	0	152.000.000	0	0	0	152.000.000
2	20	2.16.2.20.2.21.17.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	137.000.000	0	0	0	137.000.000	0	152.000.000	0	0	0	152.000.000
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	60.000.000	0	0	0	60.000.000
2	21	2.16.2.20.2.21.17.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	60.000.000	0	0	0	60.000.000
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0	353.022.900	1.977.100	0	0	355.000.000	0	355.000.000	679.878.500	0	0	1.034.878.500

2	22	1.01.2.22.0.00.0000	DINAS PENDIDIKAN	0	353.022.900	1.977.100	0	0	355.000.000	0	355.000.000	679.878.500	0	0	1.034.878.500
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	3.162.350.000	200.000.000	0	0	3.362.350.000	0	3.379.500.000	200.000.000	0	0	3.579.500.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.0000	DINAS PERPUSTAKAAN	0	3.162.350.000	200.000.000	0	0	3.362.350.000	0	3.379.500.000	200.000.000	0	0	3.579.500.000
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	70.750.000	0	0	0	70.750.000	0	50.750.000	0	0	0	50.750.000
2	24	2.23.2.24.0.00.21.0000	DINAS PERPUSTAKAAN	0	70.750.000	0	0	0	70.750.000	0	50.750.000	0	0	0	50.750.000
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.835.000.000	21.330.320.900	3.404.160.000	0	0	24.734.480.900	2.855.000.000	19.309.529.950	5.887.786.400	0	0	25.197.316.350
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	2.070.390.000	24.810.000	0	0	2.095.200.000	0	1.881.047.000	24.810.000	0	0	1.905.857.000
3	25	3.27.3.25.0.00.22.00	DINAS PERTANIAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	0	2.070.390.000	24.810.000	0	0	2.095.200.000	0	1.881.047.000	24.810.000	0	0	1.905.857.000
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0	1.706.050.000	197.950.000	0	0	1.904.000.000	0	1.232.361.450	200.000.000	0	0	1.432.361.450
3	26	2.19.3.26.0.00.20.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	1.706.050.000	197.950.000	0	0	1.904.000.000	0	1.232.361.450	200.000.000	0	0	1.432.361.450
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	160.000.000	8.140.813.200	2.000.000.000	0	0	10.140.813.200	180.000.000	6.649.253.800	4.310.376.400	0	0	10.959.630.200
3	27	3.27.3.25.0.00.22.00	DINAS PERTANIAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	160.000.000	8.140.813.200	2.000.000.000	0	0	10.140.813.200	180.000.000	6.649.253.800	4.310.376.400	0	0	10.959.630.200
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.675.000.000	5.175.375.700	1.181.400.000	0	0	6.356.775.700	2.675.000.000	5.158.049.100	1.352.600.000	0	0	6.510.649.100
3	30	3.30.3.31.0.00.18.0000	DINAS PERDAGANGAN	2.675.000.000	5.175.375.700	1.181.400.000	0	0	6.356.775.700	2.675.000.000	5.158.049.100	1.352.600.000	0	0	6.510.649.100
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0	4.237.692.000	0	0	0	4.237.692.000	0	4.388.818.600	0	0	0	4.388.818.600
3	31	3.30.3.31.0.00.18.0000	DINAS PERDAGANGAN	0	4.237.692.000	0	0	0	4.237.692.000	0	4.388.818.600	0	0	0	4.388.818.600

4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0	91.493.008.530	5.580.832.070	0	0	97.073.840.600	0	90.366.972.215	6.087.460.325	0	0	96.454.432.540
4 01		SEKRETARIAT DAERAH	0	46.575.629.930	4.005.574.070	0	0	50.581.204.000	0	46.166.593.580	3.795.202.360	0	0	49.961.795.940
4 01	4.01.0.00.0.00.23.00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA	0	46.575.629.930	4.005.574.070	0	0	50.581.204.000	0	46.166.593.580	3.795.202.360	0	0	49.961.795.940
4 02		SEKRETARIAT DPRD	0	44.917.378.600	1.575.258.000	0	0	46.492.636.600	0	44.200.378.635	2.292.257.965	0	0	46.492.636.600
4 02	4.02.0.00.0.00.24.0000	SEKRETARIAT DPRD	0	44.917.378.600	1.575.258.000	0	0	46.492.636.600	0	44.200.378.635	2.292.257.965	0	0	46.492.636.600
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	820.862.069.764	65.466.612.900	797.736.874	15.000.000.000	0	81.264.349.774	873.163.461.993	60.438.458.926	1.662.341.574	24.930.781.000	0	87.031.581.500
5 01		PERENCANAAN	0	7.414.099.645	0	0	0	7.414.099.645	0	7.674.166.940	200.000.000	0	0	7.874.166.940
5 01	5.01.5.05.0.00.25.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	7.414.099.645	0	0	0	7.414.099.645	0	7.674.166.940	200.000.000	0	0	7.874.166.940
5 02		KEUANGAN	820.862.069.764	46.110.168.805	395.552.874	15.000.000.000	0	61.505.721.679	873.163.461.993	42.301.918.036	847.274.074	24.930.781.000	0	68.079.973.110
5 02	5.02.0.00.0.00.27.00	BADAN KEUANGAN DAERAH	820.862.069.764	46.110.168.805	395.552.874	15.000.000.000	0	61.505.721.679	873.163.461.993	42.301.918.036	847.274.074	24.930.781.000	0	68.079.973.110
5 03		KEPEGAWAIAN	0	9.057.777.800	402.184.000	0	0	9.459.961.800	0	7.897.096.300	615.067.500	0	0	8.512.163.800
5 03	5.03.5.04.0.00.26.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	0	9.057.777.800	402.184.000	0	0	9.459.961.800	0	7.897.096.300	615.067.500	0	0	8.512.163.800
5 04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	2.119.568.000	0	0	0	2.119.568.000	0	1.857.159.000	0	0	0	1.857.159.000
5 04	5.03.5.04.0.00.26.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	0	2.119.568.000	0	0	0	2.119.568.000	0	1.857.159.000	0	0	0	1.857.159.000
5 05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	764.998.650	0	0	0	764.998.650	0	708.118.650	0	0	0	708.118.650
5 05	5.01.5.05.0.00.25.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	764.998.650	0	0	0	764.998.650	0	708.118.650	0	0	0	708.118.650
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	5.119.089.500	134.970.500	0	0	5.254.060.000	0	5.589.284.850	14.560.000	0	0	5.603.844.850
6 01		INSPEKTORAT DAERAH	0	5.119.089.500	134.970.500	0	0	5.254.060.000	0	5.589.284.850	14.560.000	0	0	5.603.844.850
6 01	6.01.0.00.0.00.28.0000	INSPEKTORAT DAERAH	0	5.119.089.500	134.970.500	0	0	5.254.060.000	0	5.589.284.850	14.560.000	0	0	5.603.844.850

10/27/2021

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD

		UNSUR KEWILAYAHAN	0	31.485.836.500	7.500.000	0	0	31.493.336.500	0	31.100.165.811	914.470.689	0	0	32.014.636.500
7	01	KECAMATAN	0	31.485.836.500	7.500.000	0	0	31.493.336.500	0	31.100.165.811	914.470.689	0	0	32.014.636.500
7	01	7.010.000.00.29.00 KECAMATAN BACUKIKI	0	5.922.801.500	7.500.000	0	0	5.930.301.500	0	6.002.365.500	0	0	0	6.002.355.500
7	01	7.010.000.00.30.00 KECAMATAN BACUKIKI BARAT	0	8.495.978.700	0	0	0	8.495.978.700	0	8.081.661.011	414.317.689	0	0	8.495.978.700
7	01	7.010.000.00.31.00 KECAMATAN SOREANG	0	9.410.081.000	0	0	0	9.410.081.000	0	9.401.164.000	442.153.000	0	0	9.844.317.000
7	01	7.010.000.00.32.0000 KECAMATAN UJUNG	0	7.555.975.300	0	0	0	7.656.975.300	0	7.614.975.300	57.000.000	0	0	7.671.975.300
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	3.433.535.700	0	0	0	3.433.535.700	0	5.494.098.862	0	0	0	5.494.098.862
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	3.433.535.700	0	0	0	3.433.535.700	0	5.494.098.862	0	0	0	5.494.098.862
8	01	8.010.000.00.33.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	3.433.535.700	0	0	0	3.433.535.700	0	5.494.098.862	0	0	0	5.494.098.862
TOTAL			925.792.750.393	733.442.782.051	203.333.968.342	15.000.000.000	0	951.776.750.393	976.034.142.622	735.973.604.406	248.300.885.875	24.930.781.000	0	1.009.205.271.281

Walikota Pare Pare

DR. H. M. TAUFAN PAWE, SH, MH.

KOTA PARE PARE
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00 4	PENDAPATAN DAERAH				
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.000.000	44.000.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00 4 1 02	Retribusi Daerah	44.000.000	44.000.000	0	
Jumlah Pendapatan							44.000.000	44.000.000	0	
0	00	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00 5	BELANJA				
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	197.543.605.975	201.089.046.975	3.545.441.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	0.00	00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	36.938.613.245	36.565.521.745	(373.091.500)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	18.287.711.803	17.666.928.303	(620.783.500)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	250.000.000	254.123.500	4.123.500	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06 5 2	BELANJA MODAL	250.000.000	254.123.500	4.123.500	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250.000.000	254.123.500	4.123.500	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	213.500.000	200.000.000	(13.500.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14 5 1	BELANJA OPERASI	500.000	0	(500.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000	0	(500.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14 5 2	BELANJA MODAL	213.000.000	200.000.000	(13.000.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	213.000.000	200.000.000	(13.000.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	182.890.000	182.890.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17 5 1	BELANJA OPERASI	182.890.000	182.890.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17 5 1 01	Belanja Pegawai	2.100.000	2.100.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	180.790.000	180.790.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	207.000.000	207.000.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	21 5 1	BELANJA OPERASI	207.000.000	207.000.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	21 5 1 01	Belanja Pegawai	350.000	350.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	21 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	206.650.000	206.650.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.855.000.000	1.855.000.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22 5 1	BELANJA OPERASI	3.750.000	0	(3.750.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000	0	(3.750.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22 5 2	BELANJA MODAL	1.851.250.000	1.855.000.000	3.750.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.851.250.000	1.855.000.000	3.750.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	315.000.000	276.048.000	(38.952.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23 5 1	BELANJA OPERASI	315.000.000	276.048.000	(38.952.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23 5 1 01	Belanja Pegawai	38.000.000	0	(38.000.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	277.000.000	246.048.000	(30.952.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	23 5 1 05	Belanja Hibah	0	30.000.000	30.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100.000.000	100.000.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	25 5 1	BELANJA OPERASI	100.000.000	100.000.000	0	

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
8	1	8.01.0.00.0.00.33.00	1	2.06	8					Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000	2.000.000	0	
8	1	8.01.0.00.0.00.33.00	1	2.06	8	5	1			BELANJA OPERASI	2.000.000	2.000.000	0	
8	1	8.01.0.00.0.00.33.00	1	2.06	8	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.33.00	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.985.200	173.805.200	81.820.000	
8	1	8.01.0.00.0.00.33.00	1	2.06	9	5	1			BELANJA OPERASI	91.985.200	173.805.200	81.820.000	
8	1	8.01.0.00.0.00.33.00	1	2.06	9	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	91.985.200	173.805.200	81.820.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.33.00	01	2.08	00					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.565.656	198.165.656	7.600.000	
8	1	8.01.0.00.0.00.33.00	1	2.08	1					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.999.800	14.999.800	0	
8	1	8.01.0.00.0.00.33.00	1	2.08	1	5	1			BELANJA OPERASI	14.999.800	14.999.800	0	
8	1	8.01.0.00.0.00.33.00	1	2.08	1	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	14.999.800	14.999.800	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.33.00	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	77.987.856	77.987.856	0	
8	1	8.01.0.00.0.00.33.00	1	2.08	2	5	1			BELANJA OPERASI	77.987.856	77.987.856	0	
8	1	8.01.0.00.0.00.33.00	1	2.08	2	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	77.987.856	77.987.856	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.33.00	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.578.000	105.178.000	7.600.000	
8	1	8.01.0.00.0.00.33.00	1	2.08	4	5	1			BELANJA OPERASI	97.578.000	105.178.000	7.600.000	
8	1	8.01.0.00.0.00.33.00	1	2.08	4	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	97.578.000	105.178.000	7.600.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.33.00	01	2.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	197.595.000	127.845.000	(69.750.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.33.00	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	123.595.000	103.845.000	(19.750.000)	
8	1	8.01.0.00.0.00.33.00	1	2.09	1	5	1			BELANJA OPERASI	123.595.000	103.845.000	(19.750.000)	
8	1	8.01.0.00.0.00.33.00	1	2.09	1	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	123.595.000	103.845.000	(19.750.000)	
8	1	8.01.0.00.0.00.33.00	1	2.09	5					Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000	0	
8	1	8.01.0.00.0.00.33.00	1	2.09	5	5	1			BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
8	1	8.01.0.00.0.00.33.00	1	2.09	5	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.33.00	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.000.000	19.000.000	0	
8	1	8.01.0.00.0.00.33.00	1	2.09	6	5	1			BELANJA OPERASI	19.000.000	19.000.000	0	
8	1	8.01.0.00.0.00.33.00	1	2.09	6	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	19.000.000	19.000.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.33.00	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	50.000.000	0	(50.000.000)	
8	1	8.01.0.00.0.00.33.00	1	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	50.000.000	0	(50.000.000)	
8	1	8.01.0.00.0.00.33.00	1	2.09	10	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	0	(50.000.000)	
Jumlah Belanja											3.433.535.700	5.494.098.862	2.060.563.162	
Total Surplus/(Defisit)											(3.433.535.700)	(5.494.098.862)	(2.060.563.162)	
0	0	8.01.0.00.0.00.33.00	0	0	0	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Walikota Pare Pare

Dr. H.M. Taufan Pawe, SH.,MH

KOTA PARE PARE
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

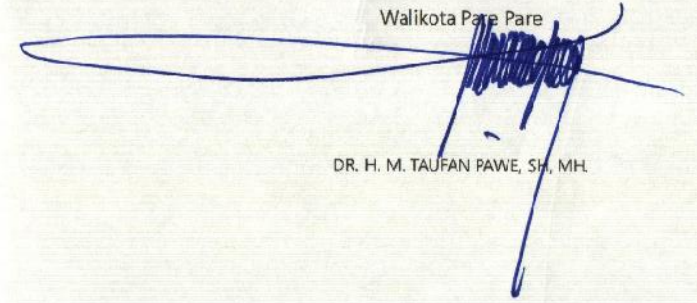
Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	440.509.791.261	171.107.183.358	0	0	611.616.974.619	449.155.365.782	217.933.792.497	0	0	667.089.158.279	55.472.183.660
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	189.520.005.175	8.023.600.800	0	0	197.543.605.975	186.790.043.806	14.299.003.169	0	0	201.089.046.975	3.545.441.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	189.520.005.175	8.023.600.800	0	0	197.543.605.975	186.790.043.806	14.299.003.169	0	0	201.089.046.975	3.545.441.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	160.452.714.930	122.277.800	0	0	160.574.992.730	163.496.271.930	987.253.300	0	0	164.483.525.230	3.908.532.500
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.000.000	0	0	0	46.000.000	46.000.000	0	0	0	46.000.000	0
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	158.109.410.498	0	0	0	158.109.410.498	161.109.410.498	0	0	0	161.109.410.498	3.000.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	157.736.202.598	0	0	0	157.736.202.598	160.736.202.598	0	0	0	160.736.202.598	3.000.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	355.207.900	0	0	0	355.207.900	355.207.900	0	0	0	355.207.900	0
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0

KOTA PARE PARE
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	440.509.791.261	171.107.183.358	0	0	611.616.974.619	449.155.365.782	217.933.792.497	0	0	667.089.158.279	55.472.183.660
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	189.520.005.175	8.023.600.800	0	0	197.543.605.975	186.790.043.806	14.299.003.169	0	0	201.089.046.975	3.545.441.000
1 01 1.01.2.220.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	189.520.005.175	8.023.600.800	0	0	197.543.605.975	186.790.043.806	14.299.003.169	0	0	201.089.046.975	3.545.441.000
1 01 1.01.2.220.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	160.452.714.930	122.277.800	0	0	160.574.992.730	163.496.271.930	987.253.300	0	0	164.483.525.230	3.908.532.500
1 01 1.01.2.220.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.000.000	0	0	0	46.000.000	46.000.000	0	0	0	46.000.000	0
1 01 1.01.2.220.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
1 01 1.01.2.220.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1 01 1.01.2.220.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1 01 1.01.2.220.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1 01 1.01.2.220.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1 01 1.01.2.220.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
1 01 1.01.2.220.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0
1 01 1.01.2.220.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	158.109.410.498	0	0	0	158.109.410.498	161.109.410.498	0	0	0	161.109.410.498	3.000.000.000
1 01 1.01.2.220.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	157.736.202.598	0	0	0	157.736.202.598	160.736.202.598	0	0	0	160.736.202.598	3.000.000.000
1 01 1.01.2.220.00.01.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	355.207.900	0	0	0	355.207.900	355.207.900	0	0	0	355.207.900	0
1 01 1.01.2.220.00.01.0000 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
1 01 1.01.2.220.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
1 01 1.01.2.220.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0

8	01	8.01.0.00.0.00.33.00	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Crang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	39.999.750	0	0	0	39.999.750	39.649.750	0	0	0	39.649.750	(350.000)
8	01	8.01.0.00.0.00.33.00	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	19.999.800	0	0	0	19.999.800	0	0	0	0	0	(19.999.800)
8	01	8.01.0.00.0.00.33.00	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	479.999.650	0	0	0	479.999.650	788.124.950	0	0	0	788.124.950	308.125.300
TOTAL							733.442.782.051	203.333.968.342	15.000.000.000	0	951.776.750.393	735.973.604.406	248.300.885.875	24.930.781.000	0	1.009.205.271.281	57.428.520.888

Walikota Pare Pare



DR. H. M. TAUFAN PAWE, SH, MH

KOTA PARE PARE
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer			
01	PELAYANAN UMUM												
01 01 1 01	Pendidikan	160.452.714.930	122.277.800	0	0	160.574.992.730	163.496.271.930	987.253.300	0	0	164.483.525.230	3.908.532.500	
01 02 1 02	Kesehatan	54.692.451.751	42.757.000	0	0	54.735.208.751	59.591.919.413	213.596.000	0	0	59.805.515.413	5.070.306.662	
01 03 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.724.025.947	99.006.000	0	0	4.823.031.947	4.942.735.947	90.506.000	0	0	5.033.241.947	210.210.000	
01 04 1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.303.230.900	43.655.800	0	0	3.346.886.700	3.637.963.600	78.585.800	0	0	3.716.549.400	369.662.700	
01 05 1 05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	10.656.848.314	770.007.000	0	0	11.426.855.314	10.798.455.664	101.372.500	0	0	10.899.828.164	(527.027.150)	
01 06 1 06	Sosial	2.372.862.570	0	0	0	2.372.862.570	2.475.086.170	288.984.800	0	0	2.764.070.970	391.208.400	
01 07 2 07	Tenaga Kerja	4.105.803.470	17.448.000	0	0	4.123.251.470	4.132.451.470	50.800.000	0	0	4.183.251.470	60.000.000	
01 08 2 08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.010.383.600	1.220.530.000	0	0	3.230.913.600	2.237.513.600	1.069.230.000	0	0	3.306.743.600	75.830.000	
01 09 2 09	Pangan	1.848.756.695	29.104.800	0	0	1.877.861.495	2.191.935.545	29.104.800	0	0	2.221.040.345	343.178.850	
01 10 2 11	Lingkungan Hidup	5.795.073.292	200.000.000	0	0	5.995.073.292	5.810.082.242	310.360.000	0	0	6.120.442.242	125.368.950	


KOTA PARE PARE
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
A SPM Bidang Pendidikan						
Pendidikan Dasar						
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	250.000.000	254.123.500	4.123.500
			Pengadaan Mebel Sekolah	213.500.000	200.000.000	(13.500.000)
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	182.890.000	182.890.000	0
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	207.000.000	207.000.000	0
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.855.000.000	1.855.000.000	0
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	315.000.000	276.048.000	(38.952.000)
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100.000.000	100.000.000	0
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	765.600.000	796.600.000	31.000.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	922.000.000	239.150.000	(682.850.000)
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	80.000.000	120.000.000	40.000.000
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	13.396.721.803	13.436.116.803	39.395.000
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0	0	0
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	18.287.711.803	17.666.928.303	(620.783.500)
			Jumlah Pendidikan Dasar	18.287.711.803	17.666.928.303	(620.783.500)
Pendidikan Kesetaraan						
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	24.500.000	24.500.000	0
			Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	15.000.000	15.000.000	0
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	888.200.000	888.200.000	0
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	40.000.000	40.000.000	0
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	967.700.000	967.700.000	0
			Jumlah Pendidikan Kesetaraan	967.700.000	967.700.000	0
Pendidikan Anak Usia Dini						
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0	0	0
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	33.000.000	33.000.000	0
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1.922.000.000	1.967.000.000	45.000.000
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	20.000.000	20.000.000	0
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	584.200.000	659.000.000	74.800.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	35.000.000	35.000.000	0
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	60.000.000	60.000.000	0
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.654.200.000	2.774.000.000	119.800.000
			Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini	2.654.200.000	2.774.000.000	119.800.000
			Jumlah SPM Bidang Pendidikan	21.909.611.803	21.408.628.303	(500.983.500)
B SPM Bidang Kesehatan						
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	44.999.550	219.397.800	174.398.250
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.999.550	219.397.800	174.398.250
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	44.999.550	219.397.800	174.398.250
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						

KOTA PARE PARE
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					
			Penyediaan Makanan	129.000.000	228.000.000	99.000.000	
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	45.000.000	45.000.000	0	
		Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			174.000.000	273.000.000	99.000.000
		Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial			174.000.000	273.000.000	99.000.000
		Jumlah SPM Bidang Sosial			464.915.600	399.474.300	(65.441.300)

Walikota Pare Pare



DR. W. M. TALIFAN PAWE, SH, MH.

KOTA PARE PARE
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PFI AYANAN DASAR	0	611.616.974.619	667.089.158.279	55.472.183.660	9 %
1	01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0	197.543.605.975	201.089.046.975	3.545.441.000	2 %
1	01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0	0	0 %
1	01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	160.574.992.730	164.483.525.230	3.908.532.500	2 %
1	01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0	36.938.613.245	36.565.521.745	(373.091.500)	1 %
1	01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	30.000.000	40.000.000	10.000.000	33 %
1	02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	0	239.565.584.704	269.666.014.341	30.100.429.637	13 %
1	02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0	0	0 %
1	02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	54.735.208.751	59.805.515.413	5.070.306.662	9 %
1	02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0	182.946.698.028	195.870.020.073	12.923.322.045	7 %
1	02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	265.789.800	12.353.951.355	12.088.161.555	4.548 %
1	02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	0	192.466.200	192.466.200	0	0 %
1	02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	1.425.421.925	1.444.061.300	18.639.375	1 %
1	03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	128.191.697.320	148.267.690.083	20.075.992.763	16 %
1	03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0	0	0 %
1	03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	4.823.031.947	5.033.241.947	210.210.000	4 %
1	03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	0	10.015.940.320	10.280.440.320	264.500.000	3 %
1	03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0	5.526.791.050	4.105.791.050	(1.421.000.000)	26 %
1	03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0	2.561.931.000	2.661.931.000	100.000.000	4 %
1	03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0	8.006.000.000	8.536.380.600	530.380.600	7 %
1	03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	0	0	0	0	0 %
1	03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0	5.977.250.000	6.844.041.000	866.791.000	15 %
1	03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0	52.320.000.000	68.108.768.375	15.788.768.375	30 %
1	03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0	38.745.753.003	42.485.735.791	3.739.982.788	10 %
1	03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0	215.000.000	211.360.000	(3.640.000)	2 %
1	04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	21.536.875.900	23.468.412.160	1.931.536.260	9 %
1	04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0	0	0 %
1	04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	3.346.886.700	3.716.549.400	369.662.700	11 %
1	04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0	100.000.000	0	(100.000.000)	100 %
1	04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	0	12.206.879.200	13.714.167.760	1.507.288.560	12 %

KOTA PARE PARE
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	667.790.000	587.790.000	(80.000.000)	12 %
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	7.466.817.000	6.917.320.050	(549.496.950)	7 %
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	371.900.000	868.514.800	496.614.800	134 %
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	3.433.535.700	5.494.098.862	2.060.563.162	60 %
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	3.433.535.700	5.494.098.862	2.060.563.162	60 %
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0	0	0 %
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	2.023.541.200	2.331.617.958	308.076.758	15 %
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0	249.998.250	324.778.250	74.780.000	30 %
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0	99.999.300	1.053.510.204	953.510.904	954 %
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0	59.999.400	443.509.400	383.510.000	639 %
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEKETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0	234.998.350	285.958.350	50.960.000	22 %
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0	764.999.200	1.054.724.700	289.725.500	38 %

Walikota Pare Pare



DR. H. M. TAUFAN PAWE, SH., MH.

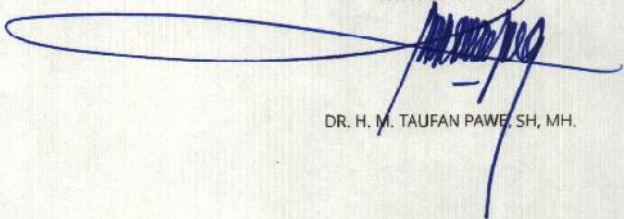
KOTA PARE PARE
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	199.123.925.475	199.123.925.475	202.123.925.475
1.01.2.22.0.00.01.0000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	198.289.046.975	198.089.046.975	201.089.046.975
1.01.2.22.0.00.01.0000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	198.289.046.975	198.089.046.975	201.089.046.975
1.01.2.22.0.00.01.0000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	161.373.310.230	161.485.725.230	164.483.525.230
1.01.2.22.0.00.01.0000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.000.000	46.000.000	46.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	20.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	6.000.000	6.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	12.000.000	12.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	Administrasi Keuangan	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	158.109.410.498	158.109.410.498	161.109.410.498
1.01.2.22.0.00.01.0000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	157.736.202.598	157.736.202.598	160.736.202.598
1.01.2.22.0.00.01.0000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	355.207.900	355.207.900	355.207.900
1.01.2.22.0.00.01.0000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.000.000	6.000.000	6.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000	6.000.000	6.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.000.000	6.000.000	6.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	0	0	0

KOTA PARE PARE
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.33.00	8	01	05	2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	267.153.450	255.958.450	255.958.450
8.01.0.00.0.00.33.00	8	01	05	2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kerahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	29.999.900	29.999.900	29.999.900
8.01.0.00.0.00.33.00	8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.197.199.700	1.054.724.700	1.054.724.700
8.01.0.00.0.00.33.00	8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.197.199.700	1.054.724.700	1.054.724.700
8.01.0.00.0.00.33.00	8	01	06	2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	226.950.000	226.950.000	226.950.000
8.01.0.00.0.00.33.00	8	01	06	2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	39.999.750	39.649.750	39.649.750
8.01.0.00.0.00.33.00	8	01	06	2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	0	0
8.01.0.00.0.00.33.00	8	01	06	2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	930.249.950	788.124.950	788.124.950
8.01.0.00.0.00.33.00	8	01	06	2.01 06	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan	0	0	0

Walikota Pare Pare



DR. H. M. TAUFAN PAWE, SH, MH.



SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
KOTA PAREPARE

NO.	RPJMD		RKPD		PERUBAHAN KUA - PERUBAHAN PPAS		RANPERDA TENTANG APBD		KETERANGAN
	URAIAN	PAGU	URAIAN	PAGU	URAIAN	PAGU	URAIAN	PAGU	
1	2	3	6	7	11	12	16	17	21
	DINAS PENDIDIKAN								
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	4,847,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	36,576,821,745.00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	36,576,821,745.00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	36,576,821,745.00	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	17,678,228,303.00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	17,678,228,303.00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	17,678,228,303.00	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	254,123,500.00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	254,123,500.00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	254,123,500.00	
			Pengadaan Mebel Sekolah	213,500,000.00	Pengadaan Mebel Sekolah	213,500,000.00	Pengadaan Mebel Sekolah	213,500,000.00	
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	182,890,000.00	Pengadaan Perlengkapan Siswa	182,890,000.00	Pengadaan Perlengkapan Siswa	182,890,000.00	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	207,000,000.00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	207,000,000.00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	207,000,000.00	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1,855,000,000.00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1,855,000,000.00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1,855,000,000.00	
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	273,848,000.00	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	273,848,000.00	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	273,848,000.00	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100,000,000.00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100,000,000.00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100,000,000.00	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	796,600,000.00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	796,600,000.00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	796,600,000.00	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	239,150,000.00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	239,150,000.00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	239,150,000.00	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	120,000,000.00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	120,000,000.00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	120,000,000.00	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	13,436,116,803.00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	13,436,116,803.00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	13,436,116,803.00	

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	248,500,000.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	248,500,000.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	248,500,000.00	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	188,500,000.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	188,500,000.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	188,500,000.00	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Ver	165,000,000.00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Ver	165,000,000.00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Ver	165,000,000.00	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23,500,000.00	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23,500,000.00	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23,500,000.00	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60,000,000.00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60,000,000.00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60,000,000.00	
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peratu	60,000,000.00	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peratu	60,000,000.00	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peratu	60,000,000.00	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		

WALIKOTA PAREPARE

TAUFAN PAWE

KOTA PAREPARE
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	2.00	-	-	-	-	1.00	-	3.00
Golongan IV/d	-	1.00	-	-	-	9.00	-	10.00
Golongan IV/c	-	16.00	1.00	-	-	44.00	-	61.00
Golongan IV/b	-	6.00	21.00	4.00	-	502.00	9.00	542.00
Golongan IV/a	-	1.00	71.00	40.00	-	329.00	17.00	458.00
JUMLAH GOLONGAN IV	2.00	24.00	93.00	44.00	-	885.00	212.00	1,074.00
Golongan III/e	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan III/d	-	-	26.00	160.00	-	450.00	89.00	725.00
Golongan III/c	-	-	-	127.00	-	281.00	202.00	610.00
Golongan III/b	-	-	-	21.00	-	163.00	220.00	404.00
Golongan III/a	-	-	-	-	-	160.00	293.00	453.00
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	26.00	308.00	-	1,054.00	804.00	2,192.00
Golongan II/e	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II/d	-	-	-	-	-	8.00	121.00	129.00
Golongan II/c	-	-	-	-	-	21.00	132.00	153.00
Golongan II/b	-	-	-	-	-	1.00	74.00	75.00
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	25.00	25.00
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	30.00	352.00	382.00

Golongan I/e									-
Golongan I/d							9.00	9.00	9.00
Golongan I/c							3.00	3.00	3.00
Golongan I/b							2.00	2.00	2.00
Golongan I/a							-	-	-
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	14.00	14.00	14.00
TOTAL	2.00	24.00	119.00	352.00	-	1,969.00	1,382.00	3,662.00	

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

DAFTAR PIUTANG DAERAH

No.	Uraian	Keterangan	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang Tahun 2019	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang 2020	Jumlah Penyisihan
1	PIUTANG PAJAK			2,523,525,803.00	1,871,405,443.00	1,331,642,833.00	3,063,288,413.00	512,127,186.22
A	HOTEL	No. Ketetapan		95,066,650.00	44,257,700.00	58,119,450.00	81,204,900.00	26,098,308.50
B	RESTORAN			761,870,631.00	443,639,026.00	164,400,900.00	1,041,108,757.00	125,073,543.23
C	HIBURAN			97,496,250.00	166,404,761.00	8,040,200.00	255,860,811.00	15,796,368.81
D	REKLAME			536,281,000.00	120,210,000.00	99,565,000.00	556,926,000.00	319,014,050.00
E	PAJAK PENERANGAN JALAN			999,095,205.00	1,082,746,664.00	999,095,205.00	1,082,746,664.00	5,413,733.32
1	PAJAK PENERANGAN JALAN		2017	-			-	-
2	PAJAK PENERANGAN JALAN		2018	999,095,205.00		999,095,205.00	-	-
3	PAJAK PENERANGAN JALAN		2019	-	1,082,746,664.00		1,082,746,664.00	5,413,733.32
F	TAMBANG GALIAN C			19,444,787.00	-	-	19,444,787.00	10,891,825.10
G	PAJAK AIR BAWAH TANAH			14,271,280.00	1,947,292.00	2,422,078.00	13,796,494.00	9,778,357.26
H	PAJAK BURUNG WALET			-	12,200,000.00	-	12,200,000.00	61,000.00
1	KAHAR HARYONO THAMRIN	750	2019		1,500,000.00		1,500,000.00	7,500.00
2	H YUNUS	752	2019		500,000.00		500,000.00	2,500.00
3	H YUNUS	753	2019		500,000.00		500,000.00	2,500.00
4	BURHAN / PERC DUNIA	831	2019		1,700,000.00		1,700,000.00	8,500.00
5	H IBRAHIM	1231	2019		300,000.00		300,000.00	1,500.00
6	HOEI HARIANTO	1232	2019		200,000.00		200,000.00	1,000.00
7	MUH NUR	1279	2019		500,000.00		500,000.00	2,500.00
8	KAHAR HARYONO THAMRIN	1282	2019		300,000.00		300,000.00	1,500.00

9. KAHAR HARYONO

No.	Uraian	Keterangan	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang Tahun 2019	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang 2020	Jumlah Penyisihan
9	KAHAR HARYONO THAMRIN	1283	2019		1,200,000.00		1,200,000.00	6,000.00
10	ROBERT W / TOKO JUJUR	1307	2019		1,500,000.00		1,500,000.00	7,500.00
11	HERMAN /TOKO SAHABAT	1353	2019		600,000.00		600,000.00	3,000.00
12	FENNY	1885	2019		1,000,000.00		1,000,000.00	5,000.00
13	RICKY /TOKO MATAHARI MOTOR	1886	2019		2,250,000.00		2,250,000.00	11,250.00
14	INDRIANI TJEN	1888	2019		150,000.00		150,000.00	750.00
	Jumlah			2,523,525,803.00	1,871,405,443.00	1,331,642,833.00	3,063,288,413.00	512,127,186.22

WALIKOTA PAREPARE,

TAUFAN PAWE